

BAB I

PENDAHULUAN

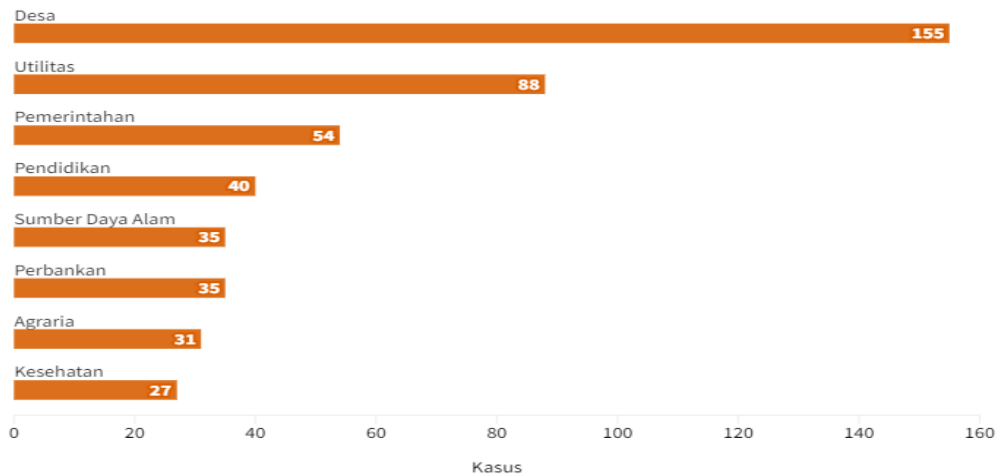
1.1 Latar Belakang

Kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan menjadi semakin penting dalam era globalisasi dan kompleksitas bisnis yang terus berkembang. Keberhasilan suatu entitas, terutama di tingkat desa, tidak hanya diukur dari segi pembangunan fisik, tetapi juga dari ketertiban dan kejelasan dalam mengelola keuangan. Perubahan global yang cepat, termasuk perkembangan teknologi informasi, telah menciptakan tantangan baru dalam tata kelola keuangan. Globalisasi telah membuka pintu bagi pertukaran informasi dan teknologi di seluruh dunia. Namun, dengan kemudahan tersebut menimbulkan risiko seperti potensi kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan (Ali et al., 2024).

Dana Desa ialah salah satu instrumen kebijakan yang berkembang dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Namun, pengelolaan dana Desa tidak luput dari risiko kecurangan dan manipulasi laporan keuangan yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat. Keberhasilan suatu entitas, khususnya di tingkat desa tidak lagi dapat diukur hanya dari pencapaian pembangunan fisik semata (K. Rahman et al., 2022). Kini, pengukuran keberhasilan juga melibatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan. Ketertiban dan kejelasan dalam mengelola dana desa menjadi kunci untuk memastikan bahwa sumber daya tersebut digunakan secara optimal dan sesuai dengan tujuan pembangunan.

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kemasyarakatan atau yang sering disebut dengan UU Desa, pemerintah desa diberikan kewenangan untuk mengurus dan memajukan masyarakatnya secara mandiri. Keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) UU Desa merupakan salah satu sumber pendanaan desa. Dalam pembahasan

ini menjelaskan bagaimana keuangan desa menyumbang sebagian pendapatan desa. Nampaknya banyak masyarakat yang merasa khawatir dengan penanganan uang desa, terutama karena adanya kemungkinan korupsi dalam penggunaannya.



Sumber: Indonesia Corruption Watch (ICW) (Sjafrina & Ramadhana, 2023)

Gambar 1.1 Sektor dengan Kasus Korupsi Terbanyak di Indonesia

Berdasarkan laporan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) pada tahun 2022 sektor desa paling banyak terjadi kasus korupsi dengan 155 kasus dan 252 tersangka. Hal tersebut setara dengan 26,77% dari total kasus korupsi di Indonesia. Inventarisasi tahunan tren antikorupsi yang dilakukan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan pola-pola yang berkaitan dengan daerah pedesaan. Korupsi di level Desa konsisten menempati posisi pertama sebagai sektor yang paling banyak ditindak atas kasus korupsi oleh aparat penegak hukum sejak tahun 2015. Sepanjang tahun 2015-2021 terdapat 592 kasus korupsi di desa dengan nilai kerugian negara mencapai Rp 433,8 miliar (Sjafrina & Ramadhana, 2023).

Penyalahgunaan anggaran desa menjadi isu yang semakin mendapat perhatian publik belakangan ini. Tindakan penipuan dan penyelewengan yang dimungkinkan oleh peran faktor pemerintah desa terjadi karena hilangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran desa, di

mana informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan realitas di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan beberapa langkah untuk meningkatkan transparansi dalam pengendalian internal (Jatmiko et al., 2023). Langkah-langkah tersebut mencakup berbagai aspek, termasuk peningkatan kejelasan dan keterbukaan dalam pelaporan anggaran desa. Informasi yang disampaikan kepada publik harus sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan, menghindari penyimpangan atau penyajian yang tidak akurat. Selain itu, penting untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas melalui partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran desa dan melalui audit internal dan eksternal yang independen (Hamid & Nasih, 2021).

Undang-undang pemerintah No. 71 tahun 2018 menetapkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan serangkaian teknik yang wajib diadopsi oleh seluruh instansi yang memiliki kewenangan dalam penyusunan metode akuntansi. Kepatuhan terhadap prinsip akuntansi dianggap sebagai kepatuhan terhadap prosedur yang diterapkan dalam pengelolaan aset instansi dan dalam penyajian laporan keuangan, yang harus disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan peraturan yang diakui oleh SAP. Perilaku tidak etis diartikan sebagai keadaan di mana individu atau kelompok bertindak tidak sesuai dengan norma dan ketentuan perusahaan, dengan hanya memprioritaskan kepentingan pribadi atau kelompok mereka. Kurangnya sistem pengendalian (*controlling*) dianggap sebagai penyebab potensial terjadinya tindakan curang dan tidak etis (Shaleh et al., 2021).

Peningkatan transparansi dapat melibatkan penerapan teknologi informasi, seperti penggunaan platform *online* atau aplikasi khusus untuk menyajikan informasi anggaran Desa secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat sehingga setiap kegiatan atau penggunaan anggaran dapat dipantau secara *real-time* oleh para pemangku kepentingan. Pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran desa tidak hanya membangun kepercayaan

masyarakat terhadap pemerintah desa, tetapi juga menjadi langkah kritis dalam mencegah penyalahgunaan dan penyelewengan dana (Purba et al., 2022).

Pada tahun 2023, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyalurkan bantuan keuangan (Bankeu) sebesar 1,7 Triliun untuk pembangunan Desa. Pada acara Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Desa di Semarang, Kepala desa dihimbau mengoptimalkan Dana Desa melalui pembelanjaan dengan *multiplier effect* tinggi berupa program padat karya dapat berfungsi optimal, harus digunakan secara tepat sasaran, guna membangun desa, sesuai kebutuhan dan potensi masing-masing (Sumarto, 2020). Dalam pengawasan Pengelolaan dana desa memerlukan sistem pengawasan yang menyeluruh. Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semuanya melakukan pengawasan secara paksa dan juga telah melakukan pengawasan pengelolaan Dana Desa dengan bersinergi dengan semua pihak (Sumarto, 2020).

Fraud dapat diartikan sebagai berbagai strategi yang cerdas yang digunakan oleh individu untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara yang tidak etis, merugikan pihak lain (Spann, 2013). *Association of Certified Fraud Examiner (ACFE)* mengelompokkan *fraud* menjadi tiga kategori, yakni penggelapan aset, pernyataan yang menyesatkan, dan korupsi. Berdasarkan survei ACFE Indonesia *Chapter*, korupsi mencatatkan persentase tertinggi sebagai bentuk kecurangan yang paling umum terjadi di Indonesia yang mencapai 64,4%. Dalam kondisi saat ini, akuntabilitas keuangan publik memiliki risiko tinggi terhadap praktek kecurangan, termasuk dalam pengelolaan alokasi dana desa (Wahyudi, 2020).

Berbagai faktor yang dapat menjadi pemicu terjadinya *fraud* mencakup pengendalian internal, moralitas individu, kompetensi sumber daya, kepuasan kompensasi, partisipasi masyarakat, budaya organisasi, gaya manajemen, dan penegakan hukum. Tingginya insiden *fraud* mendorong banyak pihak untuk memahami faktor-faktor apa yang dapat memicu

terjadinya *fraud* (Petrucci, 2013). Pada tahun 1953, Donald R. Cressey mengajukan teori yang dikenal sebagai *Fraud Triangle*, dinamakan demikian karena terdapat tiga tahap kunci dalam proses kecurangan yang mendorong seseorang untuk terlibat dalam *fraud*, yaitu tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan pembenaran (*rationalization*) (Irianto & Novianti, 2018). Tekanan merujuk pada faktor-faktor eksternal atau internal yang mendorong individu untuk melakukan tindakan kecurangan. Peluang mencakup situasi atau kondisi yang memungkinkan terjadinya *fraud* tanpa terdeteksi. Rasionalisasi melibatkan proses mental individu untuk meyakinkan dirinya bahwa tindakan kecurangan tersebut dapat dibenarkan atau diterima secara moral.

Ibu kota provinsi Jawa Tengah adalah Semarang. Kota metropolitan terbesar di Indonesia, Semarang, berada di peringkat kelima di belakang Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bandung. Terdapat 16 kelurahan di Kota Semarang, dan di setiap kelurahan terdapat banyak pemerintahan desa atau kelurahan. Salah satu Kecamatan di Kota Semarang adalah Kecamatan Semarang Selatan yang mencakup 10 Kelurahan diantaranya Bulustalan, Barusari, Randusari, Mugassari, Pleburan, Wonodri, Peterongan, Lamper Kidul, Lamper Lor dan Lamper Tengah. Berdasarkan Laporan Kinerja (Evkin) Kecamatan Semarang Selatan Tahun 2022, anggaran program pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan mencapai lebih dari 18 Miliar Rupiah dengan persentase realisasi 97,42%. Meskipun angka realisasi yang tinggi mencerminkan efisiensi penggunaan dana, tetapi perlu dilakukan analisis mendalam terkait potensi kecurangan dalam pelaporan keuangan Dana Desa.

Pendeteksian *fraud* pada pelaporan keuangan sektor swasta maupun publik dengan pendekatan *fraud triangle* telah dilakukan oleh banyak peneliti sebelumnya. Namun, pada penelitian terdahulu diperoleh inkonsistensi hasil penelitian. Inkonsistensi hasil penelitian terdahulu terangkum pada Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1

Research GAP

No.	Variabel	Peneliti Terdahulu	Hasil Penelitian
1.	<i>Pressure</i>	(Sevyiolanita, 2021) Pengaruh <i>Fraud Triangle</i> , Kesesuaian Kompensasi dan Kepuasan Kerja Terhadap Tindakan Kecurangan (Studi Pada LPD di Kecamatan Tejakula)	Tekanan (<i>pressure</i>) berpengaruh positif terhadap pendeteksian <i>fraud</i> .
		(Mintara & Hapsari, 2021) Pendeteksian Kecurangan Pelaporan Keuangan Menggunakan <i>Fraud</i> <i>Pentagon Framework</i>	Tekanan (<i>pressure</i>) tidak berpengaruh terhadap pendeteksian <i>fraud</i> .
2.	<i>Opportunity</i>	(Adi Putra et al., 2020) Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Guntur, Perpsektif <i>Fraud Diamond</i> <i>Theory</i>	Peluang (<i>Opportunity</i>) berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian <i>fraud</i> .
		(Suryandari & Valentin, 2021) Determinan <i>Fraud</i> Dana Desa: Pengujian Elemen	Peluang (<i>Opportunity</i>) tidak berpengaruh terhadap pendeteksian <i>fraud</i> .

No.	Variabel	Peneliti Terdahulu	Hasil Penelitian
		<i>Fraud Hexagon, Machiavellian, dan Love of Money</i>	
3.	<i>Rationalization</i>	(Tinay et al., 2022) Analisis Kecenderungan Kecurangan (<i>Fraud</i>) dalam Pengelolaan Keuangan Desa Menggunakan <i>Fraud Diamond Theory</i> (Studi Empiris di Kecamatan Wori)	Rasionalisasi (<i>Rationalization</i>) berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian <i>fraud</i> .
		(Rahman et al., 2023) <i>Application of Hexagon's Fraud Theory In Detecting The Tendency Of Fraud In Village Fund Management in Kerinci Regency With Religiosity As A Moderation Variable</i>	Rasionalisasi (<i>Rationalization</i>) tidak berpengaruh terhadap pendeteksian <i>fraud</i> .

Sumber: Data sekunder diolah, 2024

Penggunaan *Fraud Triangle* dapat menjadi kerangka analisis yang relevan dalam mendeteksi potensi kecurangan. Dengan persentase realisasi anggaran yang tinggi, penting untuk mengidentifikasi apakah ada tekanan yang mendorong pihak terlibat untuk melakukan kecurangan. Menurut Aguayo et al., (2021) tekanan bisa berasal dari kebutuhan mendesak atau

keinginan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Peluang muncul dari kurangnya pengawasan atau kontrol yang memadai terhadap penggunaan dana. Rasionalisasi dapat muncul jika pelaku merasa bahwa tindakan kecurangan tersebut dapat dibenarkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian mengenai deteksi kecurangan dalam laporan keuangan Dana Desa di Kecamatan Semarang Selatan dengan menggunakan konsep *Fraud Triangle* menjadi suatu inisiatif yang menarik dan relevan, sehingga peneliti tertarik mengajukan proposal penelitian dengan judul “**Pengaruh *Fraud Triangle* dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Semarang Selatan**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka muncul pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah *pressure* berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud* dalam laporan keuangan dana Desa di Kecamatan Semarang Selatan?
2. Apakah *opportunity* berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud* dalam laporan keuangan dana Desa di Kecamatan Semarang Selatan?
3. Apakah *rationalization* berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud* dalam laporan keuangan dana Desa di Kecamatan Semarang Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh *pressure* terhadap pendeteksian *fraud* dalam laporan keuangan dana Desa di Kecamatan Semarang Selatan.
2. Untuk menganalisis pengaruh *opportunity* terhadap pendeteksian *fraud* dalam laporan keuangan dana Desa di Kecamatan Semarang Selatan.

3. Untuk menganalisis pengaruh *rationalization* terhadap pendeteksian *fraud* dalam laporan keuangan dana Desa di Kecamatan Semarang Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari adanya penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Adanya kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan teori keuangan dan akuntansi, khususnya dalam konteks pendeteksian kecurangan dalam laporan keuangan dana Desa dengan melibatkan pendekatan *fraud triangle*.

2. Manfaat Praktis

Hasil analisis dapat digunakan sebagai panduan untuk memperkuat mekanisme pendeteksian kecurangan, meningkatkan pengawasan, dan merancang strategi pencegahan yang lebih efektif. Dengan demikian, instansi pemerintah, pengelola dana Desa, dan pihak terkait akan mendapatkan manfaat praktis untuk meningkatkan integritas dan keamanan pengelolaan keuangan dana Desa.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat agar isi dari penelitian ini mudah untuk dibaca dan dipahami. Sistematika penulisan pada penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, perumusan hipotesis, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta teknik analisis data.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Putra, M., Rahayu, N. T., & Sarbullah. (2020). Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Guntur, Perpsektif Fraud Diamond Theory. *Jurnal STIE Semarang*, 12(2).
- Aguayo, M. S., Urquiza-Aguiar, L., & Estrada-Jiménez, J. (2021). Fraud detection using the fraud triangle theory and data mining techniques: A literature review. *MDPI Computers*, 10(10), 1–22. <https://doi.org/10.3390/computers10100121>
- Ajzen, I. (1980). Understanding attitudes and predictiing social behavior. *Englewood Cliffs*.
- Ali, S. A., Allaymoun, M. H., Al Astal, A. Y. M., & Saleh, R. (2024). Detecting and Preventing Fraud in Financial Transactions: A Case Study on Big Data Analysis at Kareem Exchange Company. In A. Hamdan, B. Alareeni, & R. Khamis (Eds.), *Digital Technology and Changing Roles in Managerial and Financial Accounting: Theoretical Knowledge and Practical Application* (Vol. 36, pp. 305–317). Emerald Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/S1479-351220240000036028>
- Arum Ardianingsih, S. E. (2021). *Audit Laporan Keuangan*. Bumi Aksara.
- Bunga, M., Aswari, A., & Djanggih, H. (2018). Konsepsi Penyelamatan Dana Desa Dari Perbuatan Korupsi. *Halu Oleo Law Review*, 2(2), 448. <https://doi.org/10.33561/holrev.v2i2.4318>
- Cheliatsidou, A., Sariannidis, N., Garefalakis, A., Azibi, J., & Kagias, P. (2023). The International Fraud Triangle. *Journal of Money Laundering Control*, 26(1), 106–132. <https://doi.org/10.1108/JMLC-09-2021-0103>
- Da Rato, E. Y., Ardini, L., & Kurnia, K. (2023). Pengaruh Fraud Triangle terhadap Kecenderungan Fraud Anggaran Dana Desa dan Budaya Organisasi sebagai Variabel Moderasi. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(4), 3433–3446. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1688>
- Din, M. (2022). *Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah: Strategi Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Daerah* (Pertama). CV. Bintang Semesta Media.
- Elisabeth, D. M., & Simanjuntak, W. A. (2020). Analisis Review Pendeteksian Kecurangan (Fraud). *Methosika: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Methodist*, 4(1), 9–18.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. (Edisi 8). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. (Edisi 9). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Goldmann, P., & Kaufman, H. (2009). *Anti-Fraud Risk and Control Workbook*. Library of

Congress Cataloging in Publication Data.

- Hamid, A., & Nasih, M. (2021). Fraud prevention of village funds in East Java Indonesia. *Management Science Letters*, *11*, 2033–2044. <https://doi.org/10.5267/j.msl.2021.3.006>
- Helfgott, J. B. (2008). *Criminal Behavior: Theories, Typologies and Criminal Justice*. Library of Congress Cataloging in Publication Data.
- Homer, E. M. (2020). Testing the fraud triangle: a systematic review. *Journal of Financial Crime*, *27*(1), 172–187. <https://doi.org/10.1108/JFC-12-2018-0136>
- Irianto, G., & Novianti, N. (2018). *Dealing with Fraud*. Universitas Brawijaya Press. <https://books.google.co.id/books?id=y4SQDwAAQBAJ>
- Jatmiko, B., Pratiwi, N. I., Ardhi, K. F., Faculty, E., Yogyakarta, U. M., Faculty, E., & Mada, U. G. (2023). Factors Affecting Fraud in Management of Village Funds. *Proceedings of the International Conference on Sustainable Innovation*, 9–10.
- Mintara, M. B. M., & Hapsari, A. N. S. (2021). Pendeteksian Kecurangan Pelaporan Keuangan Menggunakan Fraud Pentagon Framework. *Perspektif Akuntansi*, *4*(1), 599–611. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1233>
- Narayana, A. A. S., & Ariyanto, D. (2020). Auditors Experience as Moderating Effect Investigative Abilities and Understanding of Red Flags on Fraud Detection. *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*, *7*(1), 205–216. <https://doi.org/10.21744/irjmis.v7n1.837>
- Nuryuliza, S., & Triyanto, D. N. (2019). Pengaruh Fraud Triangle terhadap Kecurangan Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017). *E-Proceeding of Management*, *6*(2), 3157–3166.
- Petrucelli, J. R. (2013). *Detecting Fraud in Organizations: Techniques, Tools, and Resources*. Wiley. <https://books.google.co.id/books?id=bmQg4ioSr24C>
- Purba, R. B., Aulia, F., Tarigan, V. C. E., Pramono, A. J., & Umar, H. (2022). Detection of Corruption in Village Fund Management using Fraud Analysis. *Quality - Access to Success*, *23*(190), 120–128. <https://doi.org/10.47750/QAS/23.190.14>
- Puspawijaya, A., & Siregar, J. S. N. (2016). *Pengelolaan Keuangan Desa* (Kedua). Pusdiklatwas BPKP.
- Rahman, K., Anggraeni, R., & Febriana, D. (2022). Fraud Triangle Mendeteksi Kecurangan Dalam Laporan Keuangan Dana Desa. *JAAK Jurnal Akuntansi & Keuangan Kontemporer*, *5*(2), 94–100.
- Rahman, N. A., Ahmad, A. H., Ani, N. S., Kadir, A. R., Reni, A., & Gjorevska, E. (2023). Application of Hexagon's Fraud Theory In Detecting The Tendency Of Fraud In Village Fund Management in Kerinci Regency With Religiosity As A Moderation Variable. *International Journal of Business and Quality Research*, *01*(3), 75–87.
- Sari, Y. P., Hetika, & Aryanto, A. (2019). Metode Pendeteksian Fraud di Indonesia : Sebuah

- Analisis Review. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, Vol.4 No.2(2), 241–248.
- Sevyiolanita, N. L. D. (2021). *Pengaruh Fraud Triangle, Kesesuaian Kompensasi dan Kepuasan Kerja Terhadap Tindakan Kecurangan (Studi Pada LPD di Kecamatan Tejakula)*. Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Shaleh, K., Irianto, G., Djamhuri, A., & Adib, N. (2021). Social Relations Behind Fraudulent Behavior: Enrichment of The Fraud Triangle Theory. *Integrated Journal of Business and Economics*, 5(3), 220. <https://doi.org/10.33019/ijbe.v5i3.376>
- Singleton, T. W., & Singleton, A. J. (2010). *Fraud auditing and forensic accounting* (Vol. 11). John Wiley & Sons.
- Sjafrina, A., & Ramadhana, K. (2023). *Sesat Pikir Perpanjangan Masa Jabatan Kades: Niat Buruk Politisasi Desa dan Suburkan Oligarki Desa*. Insonesia Corruption Watch. <https://www.antikorupsi.org/id/sesat-pikir-perpanjangan-masa-jabatan-kades-niat-buruk-politisasi-desa-dan-suburkan-oligarki-desa>
- Spann, D. D. (2013). *Fraud analytics: Strategies and methods for detection and prevention*. John Wiley & Sons.
- Sudarmanto, E. (2020). Manajemen Risiko: Deteksi Dini Upaya Pencegahan Fraud. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 9(2), 107–121.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sujeewa, G. M. M., Yajid, M. S. A., Khatibi, A., Azam, S. M. F., & Dharmaratne, I. (2018). The New Fraud Triangle Theory - Integrating Ethical Values of Employees. *International Journal of Business, Economics and Law*, 16(5), 52–57.
- Sumarto, S. W. (2020). *Akuntabilitas Dana Desa*. BPKP Provinsi Jawa Tengah. <https://www.bpkp.go.id/jateng/konten/3544/AKUNTABILITAS-DANA-DESA>
- Suryandari, E., & Valentin, L. (2021). Determinan Fraud Dana Desa: Pengujian Elemen Fraud Hexagon, Machiavellian, dan Love of Money. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 5(1), 55–78. <https://doi.org/10.18196/rabin.v5i1.11688>
- Suryandari, N. P. E., Wahyuni, M. A., & Julianto, I. P. (2019). Pengaruh Tekanan, Kesempatan, Rasionalisasi (Triangle) dan Efektivitas Penerapan Pengendalian Internal terhadap Tindak Kecurangan (Fraud) (Studi pada LPD Se-Kecamatan Negara). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 10(1), 1–10.
- Tinay, A., Karamoy, H., & Sondakh, J. J. (2022). Analisis Kecenderungan Kecurangan (Fraud) dalam Pengelolaan Keuangan Desa Menggunakan Fraud Diamond Theory (Studi Empiris di Kecamatan Wori). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"*, 13(2), 82–94. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v2i1.40>
- Wahyudi, A. (2020). Survei Fraud Indonesia 2019. In *ACFE Indonesia Chapter* (Vol. 53, Issue 9). <https://acfe-indonesia.or.id/survei-fraud-indonesia/>

